

ANALISIS PENGARUH EKOLOGI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM SEKTOR UMKM DI KELURAHAN PEKIRINGAN CIREBON

Alya Khairani¹, Siti Komariyah², Artia Fransisca Nababan³, Haniyatul Fujiah⁴
alyakhairani006@gmail.com¹, sitikkhomariyahoom@gmail.com², artianababan13@gmail.com³,
darnyo88@gmail.com⁴

Universitas Swadaya Gunung Jati

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekologi terhadap kebijakan pemberdayaan ekonomi dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pekiringan, Kota Cirebon. Masalah difokuskan pada bagaimana kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan memengaruhi efektivitas kebijakan pemberdayaan yang diterapkan pemerintah daerah. Guna mendekati masalah ini, digunakan acuan teori ekologi administrasi publik yang memandang kebijakan sebagai sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Data dikumpulkan melalui metode kualitatif non-responden dengan memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan instansi terkait, serta publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial, teknologi, dan kelembagaan memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan pemberdayaan ekonomi di Pekiringan. Modal sosial masyarakat, kapasitas kelembagaan pemerintah, serta dukungan teknologi digital menjadi faktor penguat, sedangkan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi hambatan utama. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ekologi administrasi publik mampu menciptakan kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di tingkat lokal.

Kata Kunci: Ekologi Administrasi Public, Kebijakan Pemberdayaan, UMKM, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

This article aims to analyze the influence of ecological factors on economic empowerment policies in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector in Pekiringan Village, Cirebon City. The study focuses on how social, cultural, economic, and environmental conditions affect the effectiveness of local government empowerment policies. The study employs the theory of public administration ecology, which views policy as a system interacting with its environment. Data were collected through a qualitative non-respondent method using secondary data from policy documents, institutional reports, and scientific publications. The results indicate that social, technological, and institutional factors play a crucial role in the success of economic empowerment policies in Pekiringan. Community social capital, government institutional capacity, and digital technology support act as strengths, while limited human resources and infrastructure remain major constraints. The study concludes that applying an ecological approach in public administration can create more adaptive, participatory, and sustainable policies for local MSME development.

Keywords: Public Administration Ecology, Empowerment Policy, MSME, Sustainable Development.

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) telah menjadi bagian integral dari perekonomian sejak zaman dahulu. UMKM merupakan sektor usaha dengan skala kecil hingga menengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat basis ekonomi lokal. UMKM juga menjadi wadah untuk mempromosikan keragaman budaya dan produk lokal yang memiliki nilai seni dan kearifan lokal yang tinggi. Dengan banyaknya angka

pengangguran di Indonesia, UMKM diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. UMKM ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari undang-undang tersebut di atas menyatakan bahwa ekonomi mikro adalah bidang produktif. Pada prinsipnya, perbedaan ruang lingkup antara usaha mikro (UMi), usaha kecil (UK) dan usaha menengah (UM) mengacu pada nilai awal aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), pintu), pendapatan tahunan rata-rata atau pendapatan tetap. Usaha mikro adalah usaha manufaktur yang dimiliki oleh individu dan/atau unit usaha perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang efisien dan mandiri yang didirikan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki, dikuasai atau sebagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil. Usaha menengah, khususnya usaha ekonomi produktif mandiri yang didirikan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau langsung secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan hasil kekayaan bersih atau pendapatan tahunan. Secara umum, definisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai usaha yang menciptakan barang dan jasa dengan menggunakan bahan mentah difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam, bakat, dan sumber daya produktif lainnya, kesenian tradisional yang ada di daerah. (Berbasis et al., n.d.)

Dengan demikian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya sekadar entitas ekonomi berskala kecil, tetapi juga merupakan wahana untuk memanfaatkan potensi lokal — berupa sumber daya alam, bakat, seni tradisional dan sumber daya produktif lainnya — guna menciptakan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi dan budaya. Kegiatan tersebut menggambarkan karakteristik usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh pelaku lokal yang tidak terkait secara langsung dengan perusahaan besar, sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Akuntansi et al., 2024)

Karena UMKM mengandalkan modal terbatas, seringkali berskala rumah tangga atau komunitas, dan beroperasi dalam lingkup lokal, maka pengembangan UMKM kerap dihubungkan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kebangkitan sektor kreatif dan tradisional. Sebagai contoh, pengembangan UMKM berbasis industri kreatif di daerah kota mencakup kuliner, seni, mode, musik dan interaktif permainan, yang menunjukkan bahwa UMKM mampu mengangkat potensi budaya lokal sekaligus ekonomi. Sektor kreatif memberikan sebuah kerangka yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mengubah kreativitas dan inovasi menjadi nilai ekonomi: kreativitas sebagai sumber daya utama produksi, ide sebagai inti penggerak, serta pemanfaatan keunikan lokal sebagai daya saing dalam pasar yang semakin terbuka. Sebagaimana diungkap, “ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menggabungkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi inti.”

Dalam skenario lokal, pengembangan UMKM kreatif tidak hanya sekadar meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui sinergi antara pelaku, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, penelitian di Kota Malang menunjukkan bahwa UMKM berbasis industri kreatif meliputi kuliner, seni, fashion, musik, dan permainan interaktif menghadapi tantangan seperti SDM, infrastruktur teknologi, dan pemasaran, sekaligus memiliki peluang besar untuk tumbuh bila mendapat dukungan yang tepat.

UMKM kreatif di tingkat kota berperan ganda: selain menyerap tenaga kerja dan menggerakkan permintaan lokal, sektor ini juga berfungsi sebagai penopang identitas

budaya dan daya tarik pariwisata. Studi-studi lapangan menunjukkan bahwa subsektor seperti kuliner, kerajinan, fashion, musik, dan permainan interaktif memiliki potensi pertumbuhan yang nyata tetapi potensi itu rawan tertahan oleh kendala struktural dan kapasitas internal pelaku. Sebagai contoh, analisis SWOT yang dilakukan terhadap UMKM industri kreatif di Cirebon menegaskan adanya peluang pasar dan kekayaan sumber daya lokal, namun juga menyoroti kelemahan berupa keterbatasan SDM terampil dan akses teknologi yang belum merata.

Dengan demikian, pengembangan UMKM kreatif di tingkat kota membutuhkan pendekatan multi-dimensi: (a) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan pembelajaran praktis; (b) peningkatan akses dan adopsi teknologi digital (platform e-commerce, pemasaran digital, penggunaan alat produktivitas berbasis AI sederhana); (c) fasilitasi akses ke pembiayaan mikro dan layanan inkubasi; serta (d) sinergi kebijakan publik-swasta-akademik untuk memperkuat ekosistem. Intervensi yang menggabungkan pelatihan teknis, pendampingan bisnis, dan akses pasar terbukti lebih efektif dibandingkan intervensi parsial yang hanya fokus pada satu aspek saja

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, penguatan sektor UMKM kreatif menjadi salah satu strategi penting untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal dan mendorong inovasi berbasis budaya. Kota Cirebon, dengan keragaman subsektor kreatif seperti kuliner, fashion, musik, seni rupa, serta permainan interaktif, menunjukkan potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sektor ini masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, minimnya infrastruktur teknologi, dan keterbatasan dalam strategi pemasaran yang adaptif terhadap era digital.

Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut memerlukan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta lembaga keuangan dan komunitas kreatif. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, di mana inovasi dan nilai tambah lokal menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan model penguatan UMKM kreatif berbasis kolaborasi dan teknologi digital menjadi urgensi yang perlu dikaji lebih mendalam. (Kreatif, 2023)

Menganalisis kondisi dan tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM berbasis industri kreatif di Kota Cirebon, meliputi aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, akses pembiayaan, dan strategi pemasaran dan Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di tingkat lokal, termasuk peran pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, merumuskan strategi dan model penguatan UMKM kreatif berbasis kolaborasi dan teknologi digital yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di era ekonomi digital, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan lembaga pendukung untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan inovatif bagi pengembangan UMKM kreatif di Kota Cirebon. (Silvianingsih & Wijaya, 2024)

Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi kreatif di level daerah serta memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM berbasis inovasi dan kolaborasi digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode non responden/data

sekunder untuk memahami secara mendalam hubungan antara faktor-faktor ekologi dan kebijakan pemberdayaan ekonomi dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pekiringan, Kota Cirebon. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat secara holistik, terutama dalam konteks keterkaitan antara lingkungan ekologis dan kebijakan ekonomi lokal.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kondisi ekologi seperti tata ruang lingkungan, pengelolaan limbah, ketersediaan sumber daya alam lokal, dan kualitas lingkungan hidup mempengaruhi implementasi dan efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM. Kajian ini juga menelusuri persepsi, strategi adaptasi, serta bentuk partisipasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah setempat.

Desain studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis yang terjadi di lingkungan Kelurahan Pekiringan. Lokasi penelitian ini dipilih karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi rakyat di Kota Cirebon yang memiliki beragam jenis UMKM, mulai dari sektor kuliner, kerajinan, serta perdagangan. serta menghadapi tantangan ekologis seperti pengelolaan limbah dan tata kelola ruang usaha yang padat.

Dalam pendekatan kualitatif non-responden, peneliti memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti dokumen kebijakan daerah, laporan Dinas Koperasi dan UMKM, publikasi pemerintah Kabupaten Cirebon, data dari website resmi desa, serta artikel ilmiah dan pemberitaan yang relevan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menelusuri bagaimana kondisi ekologis — mencakup aspek lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi — memengaruhi kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai keterkaitan antara kebijakan dan konteks lingkungan secara objektif melalui bukti-bukti dokumentatif tanpa interaksi langsung dengan pelaku UMKM atau aparat pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekologi administrasi publik menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi memengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Kelurahan Pekiringan, Kota Cirebon, dinamika ekologi lokal memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Basuki, 2018)

Lingkungan sosial yang beragam, tingkat pendidikan masyarakat, serta pola interaksi antar pelaku usaha menjadi faktor-faktor ekologi yang menentukan efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong transformasi ekonomi berbasis digital turut membentuk arah kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat kelurahan. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan strategi pemberdayaan agar mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM yang semakin kompleks, baik dari sisi akses modal, pemasaran, maupun penguasaan teknologi.

Secara ekologis, hubungan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan ekonomi lokal di Pekiringan menciptakan sistem yang dinamis. Kebijakan yang tidak memperhatikan konteks ekologi setempat berpotensi kurang efektif dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM.

Kebijakan pemberdayaan ekonomi dalam sektor UMKM di Kelurahan Pekiringan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan atau ekologi administrasi publik yang

melingkupinya. Faktor-faktor ekologis seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan kelembagaan membentuk sistem yang kompleks dan saling memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan ekologi administrasi publik menegaskan bahwa kebijakan tidak berjalan dalam ruang tertutup, melainkan selalu berinteraksi dengan dinamika lingkungan sekitarnya yang terus berubah. (Basuki, 2018)

Dari sisi sosial, masyarakat Kelurahan Pekiringan dikenal memiliki hubungan sosial yang erat dan nilai kebersamaan yang kuat. Modal sosial ini menjadi kekuatan utama yang dapat mendorong keberhasilan berbagai program pemerintah, termasuk upaya pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Kegiatan seperti pelatihan keterampilan, bazar produk lokal, dan kelompok usaha bersama menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik. Namun, tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama dalam memahami aspek manajemen usaha modern dan pemanfaatan teknologi digital. Perbedaan tingkat pendidikan dan literasi digital menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih mengandalkan cara-cara konvensional dalam menjalankan usahanya. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor sosial-ekologis, seperti pengetahuan, nilai budaya, dan struktur sosial, turut menentukan arah keberhasilan kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi lokal.

Dari perspektif ekonomi dan teknologi, sebagian besar pelaku UMKM di Pekiringan bergerak di sektor perdagangan, kuliner, dan jasa. Meskipun sektor ini memiliki potensi yang besar, banyak pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan permodalan, keterampilan manajerial, serta akses terhadap jaringan pemasaran yang lebih luas. Di era digital, keberadaan teknologi informasi seharusnya menjadi peluang strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Pemerintah Kota Cirebon telah berupaya untuk memfasilitasi pelatihan digitalisasi dan penggunaan media sosial bagi pelaku UMKM, meskipun penerapannya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi digital dan terbatasnya infrastruktur jaringan internet. Hasil penelitian (Rumah, 2024) menegaskan bahwa transformasi digital yang diimbangi dengan pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas pangsa pasar secara signifikan.

Selain faktor sosial dan teknologi, kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam ekologi administrasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan pemberdayaan. Pemerintah kelurahan berperan sebagai penghubung antara kebijakan daerah dengan masyarakat pelaku usaha di tingkat lokal. Efektivitas lembaga publik dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta tingkat responsivitas terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Kelembagaan yang fleksibel dan terbuka terhadap inovasi cenderung lebih efektif dalam mendorong implementasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas birokrasi menjadi salah satu unsur kunci dalam mewujudkan tata kelola kebijakan pemberdayaan yang adaptif dan efisien. (Setianingrum et al., 2024)

Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian integral dari sistem ekologi kebijakan publik. Di Pekiringan, masyarakat mulai menunjukkan keterlibatan aktif dalam program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan pelatihan kewirausahaan. Namun, sebagian besar partisipasi tersebut masih bersifat fungsional masyarakat terlibat dalam pelaksanaan, tetapi belum sepenuhnya ikut menentukan arah kebijakan. Agar pemberdayaan ekonomi lebih efektif, dibutuhkan partisipasi yang bersifat substantif, di mana masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekologi administrasi publik yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam siklus kebijakan.

Sinergi antaraktor pembangunan juga menjadi komponen penting dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal dapat memperkuat jaringan sosial-ekonomi yang mendukung tumbuhnya UMKM. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi, pelatihan, dan bantuan modal; sementara masyarakat dan sektor swasta berperan sebagai pelaku utama yang menggerakkan roda ekonomi. Ketika hubungan ini berjalan secara harmonis, terbentuklah sistem ekologi pembangunan yang inklusif, di mana seluruh pihak memiliki kontribusi terhadap kemajuan ekonomi lokal. Pengaruh ekologi terhadap kebijakan pemberdayaan ekonomi tidak hanya mencakup dimensi sosial dan kelembagaan, tetapi juga lingkungan fisik dan tata ruang. Lingkungan yang bersih, infrastruktur yang memadai, serta penataan kawasan yang mendukung aktivitas ekonomi akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar program pemberdayaan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas hidup dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hubungan antara ekologi dan kebijakan pemberdayaan ekonomi di Kelurahan Pekiringan menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks dan saling memengaruhi. Faktor-faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, teknologi, dan lingkungan membentuk jaringan sistem yang menentukan efektivitas kebijakan publik. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan adaptif dalam merespons perubahan global, seperti digitalisasi ekonomi dan transformasi sosial, tanpa mengabaikan karakteristik lokal masyarakat. Dengan memahami konteks ekologis secara menyeluruh, kebijakan pemberdayaan ekonomi dapat dirancang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pendekatan ekologi administrasi publik memberikan gambaran bahwa kebijakan yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks Pekiringan, perubahan pola konsumsi masyarakat, meningkatnya kebutuhan akan layanan berbasis digital, serta munculnya kompetisi antar pelaku UMKM menuntut kebijakan yang fleksibel dan responsif. Pemerintah daerah perlu mengadopsi prinsip adaptif governance, yaitu tata kelola yang terbuka terhadap inovasi dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi eksternal tanpa kehilangan arah pembangunan lokal. Dengan begitu, kebijakan pemberdayaan ekonomi dapat terus relevan dan berdaya guna bagi masyarakat.

Selain itu, keberhasilan kebijakan pemberdayaan ekonomi juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun capacity building bagi pelaku UMKM. Kapasitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial, keuangan, dan digital. Dalam hal ini, sinergi antara lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi hal yang penting. Lembaga pendidikan dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan riset terapan, sedangkan sektor swasta dapat berkontribusi melalui dukungan modal dan jaringan pasar. Kolaborasi multiaktor ini memperkuat struktur ekologi ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem usaha yang produktif dan mandiri. Penerapan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang memperhatikan dimensi ekologi juga akan mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, tetapi juga harus mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, pengembangan UMKM berbasis produk ramah lingkungan atau penggunaan bahan baku lokal yang berkelanjutan dapat menjadi strategi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan ekologi. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan pentingnya keselarasan antara kemajuan

ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. (Krisna, 2024)

Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal pemerintah, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti dinamika pasar dan perkembangan sosial masyarakat. Fenomena ekonomi digital dan munculnya platform perdagangan daring telah menciptakan lanskap baru bagi sektor UMKM. Pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan sistem penjualan digital memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dibandingkan mereka yang masih bergantung pada metode konvensional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi kebijakan yang bersifat adaptif dan edukatif, misalnya melalui program literasi digital, pelatihan e-commerce, serta pendampingan dalam branding dan pemasaran online.

Selain faktor eksternal, lingkungan sosial internal juga memainkan peran signifikan dalam keberhasilan kebijakan pemberdayaan ekonomi. Masyarakat Pekiringan memiliki karakteristik sosial yang khas, di mana hubungan kekeluargaan dan gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi potensi sosial yang dapat dioptimalkan untuk membangun kolaborasi antar pelaku usaha. Misalnya, pembentukan kelompok UMKM berbasis komunitas dapat memperkuat jaringan kerja sama antar warga, memudahkan akses terhadap modal, serta memperluas peluang pasar. Dalam konteks ekologi administrasi publik, kekuatan modal sosial ini merupakan elemen penting yang membantu kebijakan publik berjalan lebih efektif karena partisipasi masyarakat bukan hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi bagian aktif dari proses pemberdayaan. Namun, implementasi kebijakan pemberdayaan di Pekiringan juga menghadapi beberapa kendala struktural. Salah satunya adalah keterbatasan koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan dinas terkait di tingkat kota. Kurangnya sinkronisasi program menyebabkan beberapa kegiatan pemberdayaan berjalan secara tumpang tindih dan kurang fokus. Selain itu, masih terdapat ketimpangan informasi antara pelaku usaha kecil dengan lembaga pemerintah terkait bantuan atau pelatihan yang tersedia. Dalam konteks ekologi kebijakan, ketidakharmonisan antar unsur sistem ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antara struktur kelembagaan dan lingkungan sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih integratif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

Di sisi lain, aspek budaya lokal juga menjadi variabel penting dalam membentuk pola kebijakan yang kontekstual. Budaya kerja masyarakat Pekiringan yang cenderung mengutamakan keamanan dan stabilitas membuat sebagian pelaku UMKM enggan mengambil risiko dalam memperluas usaha. Sementara itu, nilai-nilai tradisional seperti kejujuran, kesederhanaan, dan rasa tanggung jawab dapat menjadi kekuatan moral yang menopang etika usaha lokal. Kebijakan pemberdayaan ekonomi yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekologi administrasi publik tidak hanya menyoroti aspek lingkungan fisik dan kelembagaan, tetapi juga menekankan pentingnya memahami budaya sebagai bagian integral dari sistem kebijakan.

Selain dimensi sosial dan budaya, faktor lingkungan fisik juga memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Pekiringan. Kondisi infrastruktur seperti jalan, fasilitas publik, dan tata ruang kawasan perdagangan sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Akses transportasi yang baik dan lingkungan yang tertata dapat meningkatkan mobilitas barang serta memperluas jangkauan pasar UMKM. Sebaliknya, lingkungan yang kurang terkelola akan menghambat distribusi dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota. Dengan mengadopsi prinsip pembangunan ekologis, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan

hidup.(Ery, 2022)

Pendekatan ekologi administrasi publik memberikan gambaran bahwa kebijakan yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks Pekiringan, perubahan pola konsumsi masyarakat, meningkatnya kebutuhan akan layanan berbasis digital, serta munculnya kompetisi antar pelaku UMKM menuntut kebijakan yang fleksibel dan responsif. Pemerintah daerah perlu mengadopsi prinsip adaptif governance, yaitu tata kelola yang terbuka terhadap inovasi dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi eksternal tanpa kehilangan arah pembangunan lokal. Dengan begitu, kebijakan pemberdayaan ekonomi dapat terus relevan dan berdaya guna bagi masyarakat.

Keberhasilan kebijakan pemberdayaan ekonomi juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun capacity building bagi pelaku UMKM. Kapasitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial, keuangan, dan digital. Dalam hal ini, sinergi antara lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi hal yang penting. Lembaga pendidikan dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan riset terapan, sedangkan sektor swasta dapat berkontribusi melalui dukungan modal dan jaringan pasar. Kolaborasi multiaktor ini memperkuat struktur ekologi ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem usaha yang produktif dan mandiri. (Jtcsa et al., 2024)

Penerapan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang memperhatikan dimensi ekologi juga akan mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, tetapi juga harus mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, pengembangan UMKM berbasis produk ramah lingkungan atau penggunaan bahan baku lokal yang berkelanjutan dapat menjadi strategi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan ekologi. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan pentingnya keselarasan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Dapat ditegaskan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi di Kelurahan Pekiringan harus dipandang sebagai bagian dari sistem sosial-ekologis yang dinamis. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada interaksi harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Dengan memadukan prinsip ekologi administrasi publik ke dalam setiap tahap perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemerintah daerah dapat membangun tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui strategi ini, sektor UMKM tidak hanya akan tumbuh sebagai penopang ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologi di wilayah perkotaan seperti Cirebon.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh ekologi terhadap kebijakan pemberdayaan ekonomi di sektor UMKM Kelurahan Pekiringan sangat signifikan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, dan lingkungan membentuk satu sistem yang saling berhubungan dan menentukan efektivitas kebijakan yang dijalankan. Pendekatan ekologi administrasi publik memberikan perspektif bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah semata, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen masyarakat dan lingkungan dalam berinteraksi secara seimbang.

Kebijakan pemberdayaan ekonomi yang efektif adalah kebijakan yang mampu

menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam setiap proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Kolaborasi antaraktor seperti pemerintah, pelaku UMKM, akademisi, dan sektor swasta merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berdaya tahan dan produktif.

Selain itu, penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui peningkatan literasi digital, pelatihan kewirausahaan, serta pengelolaan usaha yang profesional menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, Pekiringan dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan pemberdayaan berbasis ekologi mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, penerapan prinsip ekologi administrasi publik dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik bergantung pada keselarasan antara manusia, lingkungan sosial, dan ekologi yang melingkupinya. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka sektor UMKM di Kelurahan Pekiringan akan mampu berkembang menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Jakk, K., Rabianti, R., & Heniwati, E. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Bengkel Motor. 7(2).
- Basuki, J. (2018). Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4 . 0 : Perspektif Kebijakan Publik Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik. 3(2), 53–62.
- Berbasis, U., Kreatif, I., & Kota, D. I. (n.d.). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis industri kreatif di kota malang. X, 120–142.
- Ery, M. (2022). KESEHATAN DI INDONESIA. 3, 628–637.
- Jtcsa, A., Fatmawaty, A. S., Bijaksana, A. M. A., & Buarlele, L. (2024). JOURNAL OF TRAINING AND COMMUNITY SERVICE Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi : Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal. 21–26.
- Kreatif, E. (2023). Peran Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. 01(02), 25–32.
- Krisna, A. E. (2024). Transformasi UMKM Melalui Industri Kreatif: Pendekatan Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Inovasi. 3(4).
- Rumah, P. D. (2024). PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA DIGITAL : PENGELOLAAN TOKO ONLINE DAN PEMASARAN EFEKTIF MENGGUNAKAN. 2024, 255–265.
- Setianingrum, E., Adinugraha, H. H., Syariah, A., & Syariah, A. (2024). RISTEK : Jurnal Riset , Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang. 8(2), 30–37.
- Silvianingsih, S., & Wijaya, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Industri Batik Trusmi di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. 7..